

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Seiring dengan dinamika kebijakan pemerintah, maka untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan berpedoman pada dokumen Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Triwulan I tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2045;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perubahan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana kegiatan;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam perencanaan dan program kegiatan selama 1 tahun;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengambil langkah - langkah atau kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing – masing berdasarkan evaluasi RKPD triwulan I Tahun 2025;

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yaitu :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Setwan tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Setwan
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Setwan
- 2.4 Review terhadap rancangan RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD
- 3.3 Program dan kegiatan Tahun Anggaran

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 92.889.101.400,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 3.888.655.100,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar Rp. 96.777.756.500,00 yang terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan. Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 76.302.966.290,00. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 82.331.542.833,- atau sebesar 85,07 %.

Realisasi tersebut masih belum memenuhi target pada Tahun Anggaran 2024, hasil tersebut dikarenakan :

1. Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mempengaruhi agenda kegiatan DPRD pada tahun 2024, kemudian pada triwulan III Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak berlaku dan kembali pada peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berpengaruh besar pada persentase realisasi anggaran dikarenakan saat selisih standar satuan harga saat perencanaan dan realisasi kegiatan.
2. Terdapat beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD yang tidak dapat berjalan optimal dikarenakan padatnya jadwal kegiatan DPRD,

kegiatan yang tidak dapat berjalan optimal adalah pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pendalaman tugas DPRD.

3. Proses pemilihan legislatif, proses pemberhentian Anggota DPRD periode 2019-2024, proses pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 dan pelantikan Pimpinan DPRD, serta pembentukan Alat Kelengkapan DPRD menjadikan beberapa kegiatan kedewanan tidak dapat berjalan selama periode bulan Agustus-September 2024.
4. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan waktu dan anggaran kas, sehingga membuat beberapa kegiatan menumpuk di akhir tahun 2024 dan tidak dapat terealisasi secara optimal.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 92.601.810.095,00 dengan rincian, belanja operasi sebesar Rp. 89.681.870.095,00 dan belanja modal sebesar Rp. 2.919.940.000,00. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran sebesar 22 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2025	
						I					
				<i>k</i>	<i>Rp</i>	<i>k</i>	<i>Rp</i>	<i>k</i>	<i>Rp</i>	<i>k</i>	<i>Rp</i>
1	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan Keuangan sesuai Sap	%	100	81.434.039.395	22	17.595.597.669	22,00	17.595.597.669	22	21,61
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	%	100		22					
		Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	Level	3		3					
	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100	83.505.000	18	14.818.500	17,7	14.818.500	18	18
	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	14.900.000	-	0	-	0	-	-
	4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	2	9.055.000	-	1.659.000	-	1.659.000	-	18
	4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	59.550.000	1	13.159.500	1,0	13.159.500	50	22

	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	4.722.447.435	14	649.596.149	13,8	649.596.149	14	14
	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bula n	36	4.648.617.635	30	632.634.059	30,0	632.634.059	30	14
	4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	73.829.800	-	16.962.090	-	16.962.090	-	23
	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	1.086.563.000	1	10.540.000	1,0	10.540.000	1	1
	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	179	180.395.000	-	-	0	-	-	-
	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	128	906.168.000	3	10.540.000	3,0	10.540.000	2	1
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	33.288.416.500	20	6.644.524.922	20,0	6.644.524.922	20	20
	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	76.200.000	-	653.000	-	653.000	-	1
	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	25.693.000	2	24.520.000	2,0	24.520.000	100	95
	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1.168.800.000	0	142.561.750	0,3	142.561.750	25	12
	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan yang disediakan	Paket	1	119.833.600	1	53.743.195	0,5	53.743.195	50	45
	4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	179.069.900	0	44.217.900	0,3	44.217.900	25	25

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	641	31.718.820.000	160	6.378.829.077	160,0	6.378.829.077	25	20
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	1.095.119.200	50	509.400.000	50,0	509.400.000	50	47
4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Unit	56	266.424.000	-	-	-	0	-	-
4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	unit	11	76.843.000			22,0	0	200	-
4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	69	751.852.200	50	509.400.000	50,0	509.400.000	72	68
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.820.015.100	15	276.187.314	15,2	276.187.314	15	15
4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	110.890.000	3	14.392.500	3,0	14.392.500	25	13
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	864.494.100	3	126.469.814	3,0	126.469.814	25	15
4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	2	24.284.000	-	0	-	0	-	-
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	laporan	12	820.347.000	3	135.325.000	3,0	135.325.000	25	16
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	4.787.322.100	6	303.483.895	6,3	303.483.895	6	6
4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Unit	5	337.394.100	1	39.186.758	1,0	39.186.758	20	12

4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Unit	29	1.684.303.000	6	234.042.137	6,0	234.042.137	21	14
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	4	2.203.790.000	-	0	-	0	-	-
4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	245	280.748.000	72	30.255.000	72,0	30.255.000	29	11
4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	2	281.087.000	-	0	-	0	-	-
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	%	100	32.802.087.260	25	8.846.900.189	25,0	8.846.900.189	25	27
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	orang/bulan	50	32.160.857.260	50	8.846.900.189	50,0	8.846.900.189	100	28
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	3	551.230.000	-	-	-	0	-	-
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Orang	50	90.000.000	-	-	-	0	-	-
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%	100	1.748.563.800	19	340.146.700	19,5	340.146.700	19	19
4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	120	230.575.800	12	9.770.000	12,0	9.770.000	10	4
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	paket	4	1.517.988.000	1	330.376.700	1,0	330.376.700	25	22

2	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	11.167.770.700	18	2.056.585.600	18,4	2.056.585.600	18	18,42
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	%	100	513.901.300	-	30.742.000	-	30.742.000	-	6
	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	2	220.426.300	-	4.885.000	-	4.885.000	-	2
	4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	dokumen	3	155.095.000	-	25.857.000	-	25.857.000	-	17
	4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang tersusun	dokumen	1	138.380.000		0		0		-
	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	%	100	70.300.000	-	9.570.000	-	9.570.000	-	14
	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	41.550.000	-	4.785.000	-	4.785.000	-	12
	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD	Dokumen	3	28.750.000	-	4.785.000	-	4.785.000	-	17
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	%	100	5.403.664.400	11	572.975.500	10,6	572.975.500	11	11
	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas	dokumen	6	2.642.200.000	1	201.765.000	1,0	201.765.000	17	8
	4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	211.400.000	7	47.500.000	-	47.500.000	-	22
	4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	dokumen	6	345.270.000	-	7.177.500	-	7.177.500	-	2
	4.02.02.2.04.08 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	dokumen	175	2.204.794.400	25	316.533.000	25,0	316.533.000	14	14
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	%	90	4.885.100.000	1	1.410.295.600	1,0	1.410.295.600	1	29

	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan reses	dokumen	3	4.885.100.000	1	1.410.295.600	1,0	1.410.295.600	33	29
	4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan penyusunan kode etik DPRD	%	100	133.055.000	-	0	-		-	-
	4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	1	133.055.000	-	0	-	0	-	-
	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%	90	161.750.000	20	33.002.500	20,0	33.002.500	22	20
	4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang telah tersusun	laporan	12	136.750.000	3	23.266.600	3,0	23.266.600	25	17
	4.02.02.2.08.03 Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	jumlah dokumen hasil Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	dokumen	12	25.000.000	3	9.735.900	3,0	9.735.900	25	39
		Total Anggaran			92.601.810.095	23	19.652.183.269	92	19.652.183.269	22	21,22

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setwan

Capaian kinerja Pelayanan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023-2025
Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
Presentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Dokumen Perencanaaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	%			95	100	100	100	95	98	100	100	
Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			90	100	100	100	98	80	90	100	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			90	100	100	100	81,5	98	100	100	
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%			93	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penyelesaian Layanan Keuangan dan	%			90	100	100	100	63	90	100	100	

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	SPM /Standar Minimal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
Kesejahteraan sesuai SOP												
Prosentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%			100	100	100	100	97	95	100	100	
Presentase Implementasi Tugas dan Kewajiban yang terselesaikan Sesuai SOP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	%			100	90	100	100	100	100	100	100	
Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%			100	100	100	100	57	60	70	75	
Presentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dianggarkan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%			100	100	100	100	85	95	100	100	
Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai			77	78	79	80	78,42	79	80	81	

Dari capaian kinerja Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2025, secara garis besar telah sesuai target pada Triwulan I. Pada beberapa kegiatan tidak dapat berjalan maksimal terutama pada akhir triwulan I dikarenakan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Setwan

Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan fungsi, antara lain :

1. Penyusunan Program Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara organisasi dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan

lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya tuntutan untuk mencapai Good Governance dari DPRD sehingga menuntut semakin baiknya layanan yang harus diberikan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Perubahan kondisi dan situasi politik yang terjadi sehingga akan mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD.
3. Tuntutan untuk meningkatkan Profesionalisme SDM pada Sekretariat DPRD
4. Peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang professional.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengurangi efektivitas fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD. Beberapa isu-isu penting atau permasalahan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran di bagian, selain itu masih sedikit personil di tiap bagian yang memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran.
2. Belum optimalnya layanan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD yang sesuai Standart pelayanan dan SOP

3. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/ dinas / Lembaga lainnya.
4. Kebutuhan ASN Sekretariat DPRD belum sesuai dengan Anjab-ABK, baik dari kuantitas maupun kualitas, selain itu juga kurang meratanya penempatan ASN pada Bagian-bagian.
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja Sekretariat DPRD.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di Sekretariat DPRD

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 dapat dilihat tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2025 Kabupaten Grobogan

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100	15.672.728.900	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100	13.487.760.700	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	603.087.700	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	513.901.300	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	2	227.386.300	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	2	220.426.300	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	170.095.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	155.095.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	205.606.400	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	138.380.000	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	100	1.158.880.000	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	100	70.300.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	41.550.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	41.550.000	
	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3	1.117.330.000	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3	68.239.336	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100	572.510.000	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan hukum	48	154.960.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan hukum	48	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	48	134.760.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	48	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	48	148.800.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	48	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian	48	133.990.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian	48	0	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	100	5.686.676.200	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas	100	5.403.664.400	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								dalam menjalankan tugas			
	Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.769.200.000	Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.642.200.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	175	2.343.406.200	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	175	2.204.794.400	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	211.400.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	211.400.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6	362.670.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6	345.270.000	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100	7.273.390.000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100	7.205.090.000	
	Pelaksanaan Reses	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	7.273.390.000	Pelaksanaan Reses	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	3	7.205.090.000	
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan Penyusunan Kode etik DPRD	100	216.435.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan Penyusunan Kode etik DPRD	100	133.055.000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen Kode Etik dan tata	1	216.435.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen	1	133.055.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Beracara DPRD					Kode Etik dan tata Beracara DPRD			
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90	161.750.000	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90	161.750.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Setwan	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun	12	136.750.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Setwan	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun	12	136.750.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	25.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN	Laporan Keuangan sesuai Sap	100	89.809.572.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN	Laporan Keuangan sesuai Sap	100	78.662.133.195	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100				Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100		
			Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	2				Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	2		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	122.365.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran	100	83.505.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
						Perangkat Daerah		dan evaluasi kinerja			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	14.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	32.815.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	9.055.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	59.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	59.550.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	4.846.123.300	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	4.562.866.435	
	Penyediaan Gaji dan	Setwan	Jumlah orang yang	32	4.772.293.500	Penyediaan Gaji dan	Setwan	Jumlah orang	32	4.489.036.635	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Tunjangan ASN		menerima gaji dan tunjangan ASN			Tunjangan ASN		yang menerima gaji dan tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setwan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	73.829.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setwan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	73.829.800	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	932.363.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	1.221.160.410	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	281	180.395.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	281	281.951.642	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144	751.968.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144	969.208.768	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	43.823.186.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum	100	33.288.416.500	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setwan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1108	76.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setwan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1108	76.200.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	56	25.693.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	56	25.693.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23417	1.329.282.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23417	1.168.800.000	
	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Setwan	Jumlah paket Barang Cetak dan yang disediakan	5606	166.469.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Setwan	Jumlah paket Barang Cetak dan yang disediakan	5606	119.833.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Setwan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	2500	198.741.900	Penyediaan Bahan/Material	Setwan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	2500	179.069.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setwan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	641	42.026.801.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setwan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	641	31.718.820.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Pemerintah Daerah tepat waktu	100	548.230.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	354.982.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								Pemerintah Daerah tepat waktu			
	Pengadaan Mebel	Setwan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	127	56.544.000	Pengadaan Mebel	Setwan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	127	56.544.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	22	60.843.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	22	60.843.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	51	430.843.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	51	237.595.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.594.244.200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.720.015.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	2500	130.890.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	2500	110.890.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	744.493.200	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Setwan	Jumlah persediaan listrik, Air, Internet dan telepon Dalam satu Tahun	12	814.494.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	24.284.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan	2	24.284.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	694.577.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	770.347.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	3.399.507.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	3.187.322.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	337.394.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	337.394.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	1.684.303.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	1.684.303.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya	4	804.590.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung dan	4	603.790.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			yang dipelihara/direhabilitasi					Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	245	292.133.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	245	280.748.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	281.087.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	281.087.000	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100	32.802.087.260	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100	32.802.087.260	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50	32.160.857.260	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50	32.160.857.260	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	250	551.230.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	250	551.230.000	
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50	90.000.000	Pelaksanaan orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50	90.000.000	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	100	1.741.465.800	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi	100	1.730.575.800	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								DPRD sesuai SOP			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350	241.465.800	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350	230.575.800	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	48	1.500.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	48	1.500.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada RKPD Tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume indicator kinerja	Catatan
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional pada Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2025-2029.

RPJPN dan RPJMN menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RPJMN digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RPJMN digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 adalah Pemantaban daya saing SDM dan penguatan reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat

- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun system pemerintahan
- 8) Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Adapun tujuan pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD.

b) Sasaran kerja

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Target kinerja tujuan dan sasaran tahun berjalan 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025 Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Skor IKM	Hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	81,25	82
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Nilai	69,15	B (70)

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2025

Sekretariat DPRD dalam anggaran 2025 memiliki 2 (dua) program yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program tersebut diatas dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut ini:

Tabel 3.2

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD TA. 2025

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	83.505.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.562.866.435
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	932.363.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	33.288.416.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	354.982.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.720.015.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.187.322.100
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	32.802.087.260
	Layanan Administrasi DPRD	100	1.730.575.800
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	513.901.300
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	70.300.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	5.403.664.400
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	7.205.090.000
	Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	100	133.055.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	100	161.750.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			92.149.893.895

Menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa belanja dalam kegiatan/ sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran untuk efisiensi. Terutama pada belanja perjalanan dinas luar daerah yang diefisiensi sebesar 50 %, kemudian juga pada belanja Bimbingan teknis Sekretariat DPRD, belanja Alat Tulis Kantor, belanja makan minum rapat dan belanja cetak serta penggandaan. Sehingga total pagu anggaran Sekretariat DPRD menjadi Rp. 75.289.162.395,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pagu Anggaran setelah Efisiensi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
			APBD 2025	PERGESERAN 2025	
1	2	3	7	8	9
	SEKRETARIAT DPRD		92.601.810.095	75.289.162.395,00	-17.312.647.700,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan Keuangan sesuai Sap	81.434.039.395	64.145.358.495	(17.288.680.900)
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah			
		Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko			
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	83.505.000	83.505.000	-
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.900.000	14.900.000	-
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	9.055.000	9.055.000	-
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	59.550.000	59.550.000	-
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	4.722.447.435	4.722.447.435	-
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.648.617.635	4.648.617.635	-
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	73.829.800	73.829.800	-
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	1.086.563.000	192.797.400	(893.765.600)

4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	180.395.000	180.395.000	-
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	906.168.000	12.402.400	(893.765.600)
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.288.416.500		(33.288.416.500)
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	76.200.000	76.200.000	-
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25.693.000	25.693.000	-
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.168.800.000	935.040.000	(233.760.000)
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang disediakan	119.833.600	119.833.600	-
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	179.069.900	143.255.600	(35.814.300)
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.718.820.000	15.593.479.000	(16.125.341.000)
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	1.095.119.200	1.095.119.200	-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	266.424.000	266.424.000	-
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	76.843.000	76.843.000	-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	751.852.200	751.852.200	-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.820.015.100	1.820.015.100	-
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	110.890.000	110.890.000	-
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.494.100	864.494.100	-
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.284.000	24.284.000	-
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	820.347.000	820.347.000	-

4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4.787.322.100	4.787.322.100	-
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	337.394.100	337.394.100	-
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	1.684.303.000	1.684.303.000	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2.203.790.000	2.203.790.000	-
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	280.748.000	280.748.000	-
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	281.087.000	281.087.000	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	32.802.087.260	32.802.087.260	-
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	32.160.857.260	32.160.857.260	-
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	551.230.000	551.230.000	-
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	90.000.000	90.000.000	-
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	1.748.563.800	1.748.563.800	-
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	230.575.800	230.575.800	-
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	1.517.988.000	1.517.988.000	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	11.167.770.700	11.143.803.900	(23.966.800)
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	513.901.300	513.901.300	-

4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	220.426.300	220.426.300	-
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	155.095.000	155.095.000	-
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang tersusun	138.380.000	138.380.000	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	70.300.000	70.300.000	-
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	41.550.000	41.550.000	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD	28.750.000	28.750.000	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	5.403.664.400	5.403.664.400	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas	2.642.200.000	2.642.200.000	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	211.400.000	211.400.000	-
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	345.270.000	345.270.000	-
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	2.204.794.400	2.204.794.400	-
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	4.885.100.000	4.885.100.000	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan reses	4.885.100.000	4.885.100.000	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan penyusunan kode etik DPRD	133.055.000	109.088.200	(23.966.800)
4.02.02.2.06.00	1 Penyusunan Kode Etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	133.055.000	109.088.200	(23.966.800)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	161.750.000	161.750.000	-
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang telah tersusun	136.750.000	136.750.000	-
4.02.02.2.08.03	Fasiilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	jumlah dokumen hasil Fasiilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	25.000.000	25.000.000	-
	JUMLAH		92.601.810.095	75.289.162.395	(17.312.647.700)

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa tidak terdapat perubahan pada jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, perubahan terjadi pada pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 17.312.637.700,00 untuk efisiensi dengan tidak mengurangi optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 triwulan I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyessuaian tersebut sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat selaras dengan kebijakan Pemerintah.

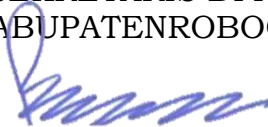
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah. Proses penyusunan Renja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Adapun kaidah pelaksanaan perubahan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Grobogan Tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perubahan renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD kabupaten Grobogan agar melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Purwodadi, 27 Maret 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si
NIP. 19690511 199001 1 001